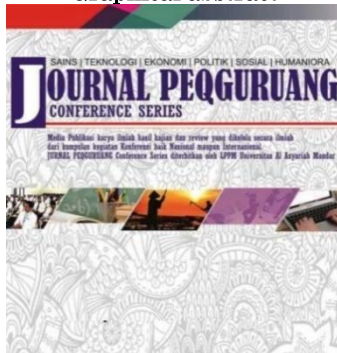


Graphical abstract



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA SISTEM DRAINASE DAN PERSAMPAHAN DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi Kasus Dinas Kantor Pekerjaan Umum)

1H. Sjuaid Hannan, 2Andriani, 3Lisma,
1Ilmu Pemerintahan,
2Fakultas Ilmu-ilmu sosial dan Pemerintahan,
3Universitas Al Asyariah Mandar.

Sjuaid hannan 2019@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the government's strategy for implementing spatial planning for the City of Polewali Mandar Regency and the suitability of policies with the facts in the field. The research method used is descriptive qualitative method. The data analysis used is the result of research instruments to find out the factors of policy implementation so that the suitability between policies and facts on the ground and also the government's strategy in implementing Regional Spatial Plans, especially in City areas, will be known. This study uses a qualitative-descriptive method located at the Office of Public Works and Spatial Planning in Polewali Mandar Regency. Research instruments used by researchers are observation, interviews and documentation. From the results of research conducted by researchers, the strategy used in achieving the objectives of the Regional Spatial Plan is to increase access to services for Cities and Centers for equitable and hierarchical regional economic growth, maintenance and realization of the preservation of environmental functions, and improvement of area management that can have a positive influence on economic, social, cultural activities, environmental preservation, and scientific development. And also the factors that hinder implementation, namely communication and resource factors.

Keywords: Policy Implementation, RT RW City Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah pada pelaksanaan tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar serta kesesuaian kebijakan dengan fakta yang ada di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah hasil instrumen penelitian untuk mengetahui faktor implementasi kebijakan sehingga akan diketahui kesesuaian antara kebijakan dengan fakta di lapangan dan juga strategi pemerintah pada pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada kawasan Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Polewali Mandar. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah peningkatan akses pelayanan Kota dan Pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan yaitu faktor komunikasi dan sumber daya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, RT RW Kawasan Kota

Article history

DOI:

Received : 11/07/2023 / Received in revised form : 11/07/2023 / Accepted :24/05/2024

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. 2016). Analisis kebijakan perlu dilakukan, terutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat. Tugas implementasi kebijakan adalah penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktifitas pemerintah.

Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. (Andriani, A. 2019)

Teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, memberi enam dimensi implementasi kebijakan yang dimaksudkan sebagai variable yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik (Kasmad. 2013)

Definisi kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. (Iskandar. 2012)

Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Kebijakan publik menurut (Hayat. 2018) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, dibuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mempunyai tujuan tertentu, serta kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat Menurut Grindle dalam Kasmad (2013) secara umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya. Menurut Van Meter dan van Horn (Handoyo, 2012) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Salah satu upaya pemerintah dalam penataan ruang Polewali Mandar khususnya pada kawasan kota

adalah dengan membuat peraturan daerah (perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013, dan pemerintah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara alamiah dalam memperoleh data berguna untuk tujuan tertentu. Data yang di dapat dari penelitian ini digunakan untuk memecahkan, memahami, serta mengantisipasi masalah yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian. Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun dengan rancangan penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu Peran Pemerintah yang dimaksudkan adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah ataupun pemerintah desa sehubungan dengan Tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan yang berke sinambungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur, (Rapa, M. T., Hannan, S., & Andriani, A., 2021).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2011)

Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada filsafat positivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2011)

Waktu Dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan setelah ujian Seminar Proposal. Objek penelitian dilaksanakan di Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum Pada Bidang Tata Ruang.

Sumber Data

1. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam dan hasil observasi terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sistem Drainase Dan Persampahan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui beberapa majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi, data online, dokumen resmi buku dan jurnal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada Sistem Drainase Dan Persampahan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja yang di anggap memahami dan mengetahui data, informasi dan fakta untuk dilakukan wawancara, baik dari pihak Pemerintah Kecamatan Malunda maupun dari Masyarakat sesuai dengan lokasi penelitian. Menurut (Amirullah, 2015) Purposive sampling merupakan salah satu bentuk dari convenience sampling yang dimana dalam teknik ini sampel dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.

Adapun informan dari penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sistem Drainase Dan Persampahan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Pemerintah Daerah	10 Orang
2.	Masyarakat	10 Orang
Jumlah		20 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

2.Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sistem Drainase Dan Persampahan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar.

3.Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007: 62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan

data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti mengacu pada tahapan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Herdiansyah, Haris (2010: 164) yaitu:

1. Pengumpulan data.

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.

2. Reduksi data (*Data reduction*).

Data yang telah diseleksi akan diolah dengan cara mereview dan menyatukan serta memformulasikan data, sehingga data yang sama dari hasil interview dan data non interview dapat dikategorisasikan untuk memudahkan informasi dalam proses analisis data.

3. Penyajian data (*Data display*).

Proses penyajian data dilakukan melalui penyusunan dan pengkategorisasian data yang diperoleh dari pengolahan data, sehingga penyatuan data tersebut dihubungkan dengan pola yang terdapat pada hasil temuan di lapangan yang selanjutnya akan di analisa oleh peneliti dengan berdasarkan teori yang relevan.

4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*).

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penataan ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar belum optimal. Seperti yang telah penulis amati, dua hal yang masi belum maksimal dalam pengimplementasiannya yakni mengenai Persampahan dan Drainase. Masi ada beberapa titik terjadi penumpukan sampah yang mengganggu keindahan Kota serta drainase yang kadang tersumbat sehingga ketika hujan deras mengakibatkan jalan trotoar ikut tergenang Untuk mendukung suatu implementasi tata ruang khususnya pada kawasan Kota, masyarakat sangat berperan dalam hal ini. Akan tetapi, jika masyarakat abai dengan aturan yang ada serta pemerintah kurang tanggap, mak tentu implementasi dari sebuah kebijakan tidak akan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan.

Untuk penataan ruang, ada beberapa tingkatan mulai dari penataan tingkat nasional sampai ke skala yang apaling kecil yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sub Bagian Wilayah Kota. Kota Polewali, yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata umum ruang ke

dalam proses rencana rinci/detail ruang kawasan yang diwujudkan kedalam rencana penangan Sub Bagian Wilayah Kota. Kota Polewali yang diprioritaskan Kawasan perencanaan yaitu sepanjang Jalan Hos Cokrominato sampai Jalan RA. Kartini, Jalan Pemuda, Jalan Tamajarra, Jalan H. Agus Salim. Kawasan perencanaan dengan luasan 56,91 Ha terdiri dari kawasan Pusat Olahraga dengan beberapa fungsi ruang yaitu : lapangan olahraga terbuka, gedung olahraga tertutup, stadion, kolam renang, arena pacuan kuda.

Kawasan perdagangan dengan fungsi ruang pasar sentral, ruko dan bangunan rumah tinggal dan kawasan perencanaan perkantoran yaitu beberapa pada sisi Jalan RA. Kartini yang saat ini terdiri dari fungsi ruang perumahan, peribadatan, kesehatan, perkantoran dan masih didominasi oleh lahan pertanian sawah.

Untuk kawasan Kota, ketersediaan sarana yang ada di kawasan kota saat ini, selain sarana Kota juga terdapat fasilitas-fasilitas umum lainnya berupa fasilitas ibadah (mesjid dan gereja), kesehatan (rumah sakit), perdagangan (toko campuran). Meskipun masih dalam proses pembangunan, fasilitas kesehatan tersebut saat ini sudah difungsikan dalam pelayanannya. Sarana perdagangan yang tersedia berupa toko campuran merupakan sarana perdagangan yang melayani masyarakat perumahan yang berada disekitar lokasi.

Sarana penunjang yang terdapat pada kawasan perdagangan yaitu sarana tempat ibadah yang terletak di dalam pasar. Selain sarana penunjang pada bangunan pasar tersebut, berkembangnya fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa berupa bangunan rumah toko (ruko), bank dan warung makan juga menjadi sarana penunjang bagi pelaku aktivitas perdagangan di kawasan tersebut maupun bagi masyarakat Polewali Mandar secara umum.

Kemudian ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah perencanaan khususnya pada kawasan olahraga dan kawasan perkantoran terlihat masih cukup mendominasi. Namun pada kawasan perdagangan ketersediaan ruang terbuka hijau sudah sangat terbatas dan didominasi oleh lahan yang terbangun. Umumnya ruang terbuka hijau di kawasan perencanaan terbagi menjadi dua yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Pada kawasan Kota ruang terbuka hijau berupa lahan Sesuai kawasan Kota yang memiliki potensi intensitas perkembangan yang cukup besar akan berakibat pada dapat berkurangnya ruang terbuka hijau seiring berkembangnya kawasan tersebut. Maka langkah antisipasi dalam memelihara ruang terbuka hijau perlu dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau, guna menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pada pelaksanaan kebijakan mengenai penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar. Yang pertama faktor komunikasi. Komunikasi yang kurang, baik pembuat kebijakan dengan pelaksanaan maupun pemerintah atau pelaksana dengan masyarakat tidak akan sesuai dengan kebijakan atau apa yang telah diputuskan. Kemudian faktor yang kedua, yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni sumber daya. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, staf dan anggaran masih sangat kurang Faktor

yang ketiga mempengaruhi implementasi kebijakan yakni sikap yang dimiliki implementor. Apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah pada pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2032.

a) Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Implementasi kebijakan penataan ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali n mewujudkan Bagian Wilayah Kota dalam rangka mendukung kawasan fungsional pusat pemerintahan, dan pelayanan umum pendidikan serta kesehatan yang aman, produktif, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Beberapa program tata ruang yang menjadi topik yaitu menyangkut dengan pembangunan atau pemanfaatan lahan. Pada topik implementasi tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan Polewali). Penulis menguraikan beberapa program tata ruang Kota Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan dari wawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta beberapa staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Penataan Ruang.

Pelaksanaan penataan ruang tersebut harus berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang mengataur beberapa program tata ruang yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan perpanjangan tangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar khususnya pada bidang Penataan Ruang dan Dinas-Dinas lain yang bersangkutan.

Dalam penataan ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar. Terdapat aturan yang mengatur yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032. Dalam menjalankan langkah-langkah penataan ruang tersebut tentu tidak akan mudah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tiap-tiap peraturan daerah tersebut. Pihak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Kecamatan Polewali khususnya akan mendapatkan tantangan dalam penataan ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi Kawasan Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan, sosial dan kegiatan ekonomi.

Pada penataan ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar belum optimal. Seperti yang telah penulis amati, masih ada beberapa titik terjadi

penumpukan sampah yang mengganggu keindahan Kota serta drainase yang kadang tersumbat sehingga ketika hujan deras mengakibatkan jalan trotoar ikut tergenang.

Untuk mendukung implementasi tersebut, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Rencana Rinci/Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun, baik untuk rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 20 Tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 5 (lima) tahun termasuk Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 5 (lima) Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, serta Renja-SPKD.

Polewali Mandar yang meliputi berbagai aspek yang dimana aspek-aspek sangat menentukan kualitas pelaksanaan tata ruang di Kota Polewali. Salah satu point penting yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang menentukan kualitas tata ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan tata ruang tersebut juga harus memiliki keterpaduan perencanaan tata ruang tersebut juga harus memiliki keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, Provinsi dan Daerah. Program tata ruang juga harus mempunyai keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang menentukan kualitas tata ruang di Kota Polewali diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Polewali Mandar disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya. Posisi Kabupaten Polewali Mandar dengan potensi kebudayaan dan pariwisata jasa dan perdagangan.

Setiap Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut merupakan kawasan Kota atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Kawasan strategis Kabupaten/Kota dapat disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) apabila merupakan kawasan yang mempunyai ciri Kota atau direncanakan menjadi kawasan Kota.

Kawasan Kota Polewali pada prinsipnya merupakan penjabaran dari rencana tata ruang dengan hirarki yang diatasnya. Maka, untuk mendukung implementasi perencanaan tersebut, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan rencana pembangunan daerah yang telah disusun, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun termasuk Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, serta Renja-SPKD Tahunan masing-masing SKPD.

Yang mempengaruhi terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 adalah kondisi APBD

Polewali Mandar dimana Pemerintah Kota harus mampu menyeimbangkan antara jumlah anggaran yang diperlukan dalam proses tata ruang kota dengan anggaran yang dimiliki. Dan juga, merupakan kebijakan mutlak dari Provinsi dan Pusat.

b) Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar, yakni mulai dari kualitas sumber dayanya, pemerintah daerah sampai pada pelaksanaannya. Dari hasil wawancara peneliti, maka dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat berperan dalam pencapaian implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar. Komunikasi yang baik dengan pemerintah dengan dinas-dinas, pelaksanaan maupun pihak-pihak yang terkait akan lebih akurat, tepat dan konsisten dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

Komunikasi dalam hal ini yaitu proses penyampaian informasi dari pemerintah dari ke pelaksana di lapangan maupun pemerintah ke masyarakat. Penyampaian informasi menyangkut keputusan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan serta teknisnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengimplementasikannya dan apa keputusan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya sesuai dengan apa yang di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari implementasi Penataan Ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 diharapkan berjalan secara optimal.

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana.

Informasi yang jelas akan mendukung pihak maupun yang terkait dengan pelaksanaan tata ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan implementasi penataan ruang di kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan implementasi penataan ruang kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 ini, perlu adanya penyampaian informasi yang baik pada seluruh target group dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan atau dinas-dinas lain yang terkait dalam pelaksanaannya, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai kemunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Implementasi harus konsisten, jelas dan bersih sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif, informasi jelas dan bersih, akan tetapi instruksi atau perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudag terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan implementasi penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar sangat dituntut adanya konsisten informasi namun jika terjadi perubahan karena melihat kondisi masyarakat, secara otomatis informasi yang beredar dimasyarakat juga ikut berubah.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika kekeurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkomponen dibidangnya, selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau implementasi penataan ruang di kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Ada beberapa komponen yang meliputi sumber daya,

Yang pertama, Sumber Daya meliputi staf. Pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan yang namanya staf, yang mana staf ini sebagai pelaksana suatu kebijakan, baik administrasinya maupun di lapangan. Tanpa adanya staf, suatu kebijakan tidak akan berjalan dan hanya tinggal dokumen tanpa realisasi. Oleh karena itu, ketersediaan staf pelaksana

yang cukup serta berkomponen sangat mendukung dalam realisasi kebijakan penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar terkhusus pada kawasan Kota yakni di Kecamatan Polewali.

Yang kedua, salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya pada pelaksanaan suatu kebijakan, yakni ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan kebijakan. Pada pelaksanaan suatu kebijakan hal yang utama sebenarnya adalah anggaran. Anggaran yang memadai sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, sehingga dalam rapat-rapat, hal yang tidak luput untuk dibahas yaitu anggaran.

Sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sama halnya dengan implementasi penataan ruang di kawasan Kota Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini pelaksanaannya membutuhkan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai. Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana.

3. Sikap

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sikap sangat diperlukan. Kesamaan pandangan dalam satu tim untuk pelaksanaan suatu kebijakan akan mempermudah pencapaian tujuan. Jika para implementor kebijakan terpecah belah dalam sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan kebijakan kadang kala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

Apabila pelaksana memiliki sikap yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien. Peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya sikap atau pandangan yang sama agar pencapaian tujuan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Faktor yang keempat menurut Edward III yaitu struktur birokrasi pada pelaksanaan suatu kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Edward III, menyatakan fragmentasi adalah penyabaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlihat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksana suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Komunikasi yang masi perlu ditingkatkan agar pelaksana maupun masyarakat lenih paham lagi. Sedangkan sumber daya juga masih kurang, baik itu staf maupun anggaran.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menemukan jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada pada rumusan masalah. Penulis menarik dua kesimpulan dari hasil penelitian yaitu, Keselarasan kebijakan dengan fakta tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar masi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan beberapa faktor yaitu salah satunya sosialisasi pemerintah yang perlu ditingkatkan sehingga pemahaman masyarakat juga akan meningkat. Dari hasil peneltian yang peneliti lakukan, diketahui bahwa strategi penataan ruang yang ditempuh dalam rangkah mencapai tujuan penataan ruang yang telah diamatkan dalam dokumen RT/RW Kabupaten Polewali Mandar, meliputi strategi peningkatan akses layanan Kota dan Pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2019). Manajemen Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Mamuju. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Amirullah. (2015). *Populasi dan Sampel*. 1–14. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Made, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Inovatif kontemporer*. In Bumi Aksara: Jakarta
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans: Publishung.
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032*. 2013
- Rapa, M. T., Hannan, S., & Andriani, A. (2021). Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mamasa Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Mamasa. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 5(2).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuntitaiif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2).